

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Aneh Tak Dieksekusi

Anies: Tak Mungkin Teliti Satu Persatu

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur Anies Baswedan memastikan program dengan anggaran yang tak jelas alias aneh tidak akan dieksekusi.

Anies meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) membahas APBD 2020 bersama DPRD DKI Jakarta dengan cermat. Anggaran lem aibon dan ballpoint dipastikan dicoret.

Anies mengatakan, tidak mungkin dia meneliti satu persatu. Sebab, ada belasan ribu item mata anggaran. Yang menjadi perhatian adalah anggaran dengan jumlah besar. Contohnya pembelian ballpoint sebesar Rp635 miliar dan sudah dikoreksi.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan Dewan saat ini masih merumuskan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sejauh ini baru muncul dua item anggaran yang dinilai janggal yakni pembelian lem aibon dengan anggaran sebesar Rp82 miliar dan ballpoint senilai Rp120 miliar.

Terhadap pembelian ballpoint tersebut,

Anies sepekan sebelum pembahasan sudah menyisir anggaran itu yang awalnya berjumlah Rp635 miliar.

"Ini jelas anggaran tidak masuk akal. Kami juga sudah menyisir ini sebelumnya tetapi memang tidak diungkap ke masyarakat, cukup internal. Itulah kenapa anggaran harus dibahas bersama DPRD," katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, tidak kaget mendengar kabar pemberitaan mengenai pengajuan anggaran lem Aibon yang mencapai Rp82 miliar.

"Kenapa kami harus kaget dan memperdebatkan kenapa bisa muncul pemberitaan itu. Bagi kami di jaman keterbukaan seperti ini, hal itu bisa saja terjadi. Apalagi data KUA PPAS kan bisa juga diambil dari hard copy KUA PPAS yang sudah diberikan kesetiap anggota Dewan," tutur Inggard.

PEMBELAJARAN

Inggard mengatakan, justru dengan mencuat-

nya pemberitaan soal anggaran lem aibon ini bisa menjadi pembelajaran bagi Dewan supaya teliti dalam menyoroiti item-item anggaran yang diusulkan oleh eksekutif.

"Begitu pun sebaliknya pihak eksekutif tidak bisa asal-asalan dalam mengusulkan anggaran. Karena yang dipakai adalah duit rakyat yang harus ada pertanggungjawabannya," terang Inggard.

Selain anggaran lem Aibon, ditemukan juga pengajuan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta.

"DPRD memastikan anggaran yang tidak jelas dan tidak bermanfaat pasti dicoret. Makanya ada rapat pembahasan. Sebetulnya ini hal lumrah saja," pungkasnya. (john/ruh/st)